



Pansus DPR Beri Penilaian Ada Ketidapatuhan dalam Pelaksanaan UU Haji

JAKARTA (KR) - Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI merekomendasikan agar DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Haji).

"Dibutuhkan revisi terhadap UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Undang-Undang No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji," kata Ketua Pansus Angket Haji DPR RI Nusrion Wahid dalam Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (30/9).

Hal tersebut merupakan salah satu rekomendasi dari Pansus Angket Haji DPR setelah melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya ketidakpa-

tuhan dalam pelaksanaan UU Haji. Dalam penyelidikan yang dilakukan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan inspeksi lapangan itu, Pansus Angket Haji merumuskan rekomendasi revisi UU Haji agar penyelenggaraan haji ke depan untuk jemaah dari Indonesia mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan haji di Arab Saudi.

Dalam penyelidikan, Pansus Angket Haji menemukan penyelenggaraan ibadah haji saat ini masih belum sesuai kondisi terkini di Arab Saudi, seperti

Kementerian Agama (Kemendagri) dalam penyelenggaraan ibadah haji masih berperan ganda sebagai regulator dan operator.

Sementara, kata Nusrion, dalam pelaksanaan haji di Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan dari pemerintah ke pemerintah, tetapi berubah menjadi pemerintah ke bisnis, sehingga pelayanan yang diberikan kepada pihak syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji menggunakan kerangka bisnis.

Pansus Angket Haji juga menemukan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Pasal 64 UU Haji. Pansus menilai Menteri Agama (Menag) menyalahi ketentuan alokasi kuota haji karena memutuskan kuota tambahan dialokasikan 10 ribu untuk jemaah haji

* Bersambung hal 7 kol 5



WASPADA GELOMBANG TINGGI: Foto udara kondisi jalan yang rusak akibat gelombang tinggi di Desa Gondoroso, Lumajang, Jawa Timur, Senin (30/9/2024). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir agar waspada terhadap gelombang tinggi mencapai 2,5 meter yang berpotensi terjadi pada Senin (30/9) hingga Selasa (1/10) di sejumlah perairan Indonesia.

BUNTUT PEMBUBARAN DISKUSI DI KEMANG Bidpropam Polda Periksa 11 Anggota

JAKARTA (KR) - Polda Metro Jaya telah memeriksa 11 anggotanya terkait peristiwa pembubaran dan perusakan pada acara diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/9). Selain memeriksa anggota Kepolisian, terdapat dua saksi yang juga diperiksa yaitu petugas sekuriti dan manajer Hotel Grand Kemang.

"Sampai dengan saat ini Bidang Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan kepada sebelas

petugas dari Polres, Polsek, dan Polda. Seperti itulah tahapan yang dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Jadi mohon waktu, Bidang Propam masih melakukan pendalaman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Senin (30/9).

Untuk motif pembubaran acara tersebut, Ade Ary menyebutkan masih didalami terus. Sedang terhadap beberapa pelaku yang terekam di video dan berdasarkan hasil kete-

rangan tersangka itu akan terus dikejar dan dicari untuk dimintai pertanggungjawaban.

"Hal-hal seperti ini sangat tidak dibenarkan, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, apalagi ada perusakan properti dan barang milik orang, ada beberapa orang yang melakukan pemukulan. Ini hal yang sangat tidak baik. Kami pasti akan mendalami dan mengusut tuntas," tegas Ade Ary.

* Bersambung hal 7 kol 5

Analisis Viral di Akhirat

Budi Hanoto SE MBA



PENYUSUN konten kreatif saat ini dibuat mudah. Siapa saja bisa bikin konten, karena saat ini kita didukung sarana canggih teknologi dan digital berupa smartphone, alias telepon cerdas. Diskursus atas konten yang viral dalam konteks ekonomi digital sangat menarik dicermati dalam pembentukan opini. Rasional thinking seorang dapat tergerak oleh sebuah konten. Penikmat konten unggahan lantas harus dipilih, apakah mereka memiliki pengetahuan cukup, atau hanya berperilaku mengikuti arah keramaian (herding behaviour).

Konten kreator tentu mampu membangun sebuah image, mempengaruhi persepsi, dan menciptakan opini masyarakat.

Tak pelak, sebuah peristiwa unik di daerah terpicil cepat menyebar. Tak heran, sebuah warung makan di daerah dengan rasa yang medok dan lezat dikreasikan dengan penjaja paras manis, mendadak viral dibuat magis, bahkan makin laris.

Kreasi konten untuk membentuk ekspektasi masyarakat sah-sah saja. Itu salah satu channel komunikasi. Ia akan menciptakan dan mendorong konsumerisme di daerah warung tersebut berlokasi. Konten juga dapat memberikan efek multiplier dengan mengunggah atau mencipta bisnis warung serupa di daerah lain. Pendeknya, viralnya aktivitas ekonomi yang positif dapat memberi getok tular nilai tambah bagi perbaikan ekonomi masyarakat.

* Bersambung hal 7 kol 1

DEWAN BARU HARI INI DILANTIK Pimpinan DPR RI Berpamitan



Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Lodewijk Freidrich Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar usai memimpin Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 Keanggotaan DPR RI 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

JAKARTA (KR) - Ketua DPR RI Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, Muhaimin Iskandar dan Rachmat Gobel berpamitan usai menghadiri Rapat Paripurna

DPR RI Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 yang menjadi rapat terakhir DPR RI masa jabatan 2019-2024.

* Bersambung hal 7 kol 1

TERKAIT TPPU PT ASSET PASIFIC Kejagung Sita Uang Rp 450 M

JAKARTA (KR) - Penyitaan dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) berupa uang sebanyak Rp 450 miliar. Uang tersebut dari tersangka korporasi PT Asset Pacific yang masih satu grup dengan PT Duta Palma terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Kejaksaan Agung melakukan penyitaan berdasarkan pengembangan penyidikan dalam perkara Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman," jelas Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar di Jakarta, Senin (30/9).

Dari pengembangan kasus tersebut, menurutnya, telah menyita sebanyak Rp 450 miliar. Uang tersebut hasil TPPU yang dilakukan oleh PT Asset Pacific salah satu grup PT Duta Palma.

Qohar menyebutkan, selain PT Asset Pacific, terdapat lima perusahaan lain yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus TPPU dan tindak pidana korupsi. Adapun kelima perusahaannya tersebut adalah PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani.

Terkait pengembangan selain terhadap perusahaan tersebut, menurutnya, penyidik juga telah menetapkan satu tersangka tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi PT Darmex Plantations. Untuk itu, tim penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit telah menyita uang sejumlah Rp 450 miliar dari tersangka korporasi PT Asset Pacific. (Fu)-d

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
Selasa, 1 Oktober 2024	11:32	14:39	17:36	18:45	04:08

MUI MINTA MASYARAKAT Tetap Boikot Produk Terafiliasi Israel

JAKARTA (KR) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat untuk tetap konsisten memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, sebagai bentuk dukungan perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Jangan pernah berhenti dalam gerakan boikot. Sebab, genosida di sana juga tidak berhenti. Makanya, tugas kita terus mendukung gerakan boikot produk Israel dan semua yang terafiliasi," ujar Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Cholil Nafis di Jakarta, Senin (30/9).

Seruan itu bagian dari refleksi MUI terhadap genosida Israel atas Gaza di Palestina yang genap satu tahun pada 7 Oktober 2024. Cholil berharap kekompakan dan dukungan Muslimin dari seluruh lapisan masyarakat untuk Palestina.

Pernyataan resmi otoritas kesehatan di Gaza belum lama ini menyebutkan, hampir 45.000 orang warga Gaza tewas dalam setahun terakhir, dimana sebagian besarnya adalah anak-anak dan perempuan. Barbarisme mesin-mesin perang Israel telah meluluhlantakkan wilayah kecil di Selatan Palestina tersebut, melukai lebih dari 100.000 orang dan memaksa 2 juta lebih penduduknya hidup di tenda-tenda pengungsian.

* Bersambung hal 7 kol 5

Aturan Baru Akreditasi PT Rugikan PTS

BANTUL (KR) - Peraturan Mendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah menetapkan aturan terbaru dalam proses akreditasi perguruan tinggi (PT). Salah satu isi dari peraturan ini menetapkan hanya akan ada dua klasifikasi perguruan tinggi, yaitu "Terakreditasi" dan "Tidak Terakreditasi". Kebijakan ini memberatkan dan merugikan perguruan tinggi swasta (PTS).

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Dr Gunawan Budiarto dalam agenda Penandatanganan Komitmen Bersama PTS di DIY dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Wilayah V, Senin (30/9) petang di UMY menilai, dua klasifikasi itu menjadikan masyarakat

akan mengalami kesulitan untuk menilai apakah perguruan tinggi tersebut sudah mumpuni dalam menjalankan program pendidikan atau belum.

"Hilangnya klasifikasi yang membedakan antara

yang unggul dengan yang tidak, memiliki dampak yang dirasa kurang adil bagi beberapa perguruan tinggi," ujar Gunawan.

Rektor UMY ini berharap akan ada peninjauan ulang terkait Permendik-

budristek ini, sehingga masyarakat dapat benar-benar melihat kualitas dari semua perguruan tinggi di Indonesia secara transparan.

Sementara itu, komitmen bersama PTS diharap-

kan menjadi sinergi untuk mencapai target akreditasi Unggul dari seluruh program studi (prodi).

* Bersambung hal 7 kol 1



Simbolik para rektor menunjukkan dokumen kesepakatan bersama.

**SUNGGUH
SUNGGUH
TERJADI**

● **SENIN 17 September 2024 malam, tetangga saya kirim pesan WA tanya apakah bapak saya ada di rumah. Ia baru saja bertamu dan mengetuk pintu tapi tidak ada yang jawab. Saya balas, "Ada. Coba ke rumah lagi. Ketuk pintunya yang keras dan panggil bapak saya. Bapak sedang asyik nonton bola di TV." (Yeni Dalam, Jalan Jati Selatan Dalam 6/83 RT 03 RW 13 Banyumanik Semarang)-d**